

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Sumberrahayu sudah sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan maupun kebijakan yang berlaku. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan telah terlaksana secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Penggunaan *website* yang efektif membuat keterbukaan informasi bagi masyarakat umum yang ingin mengakses penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan dana desa yang ada di desa Sumberrahayu.
2. Pengelolaan dan penyerapan dana desa yang dianggarkan pada bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana meningkatkan indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan namun mempengaruhi indeks ketahanan ekonomi karena kurangnya penyaluran dana pada dimensi tersebut. hal tersebut menyebabkan nilai indeks desa menurun dan ketidakseimbangan nilai komposit.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa cukup baik. Padat Karya Tunai Desa menjadi pola pada desa Sumberrahayu dalam pengelolaan dana desa sehingga partisipasi masyarakat secara swakelola dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tercapai pembelajaran, peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan materil tidak menjadi alasan dalam partisipasi masyarakat Sumberrahayu.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa keterbatasan penelitian dalam penyusunan penelitian pengelolaan dana desa yaitu:

1. Kurangnya partisipasi unsur wakil masyarakat dalam melakukan penelitian sehingga tidak bisa menggambarkan secara spesifik dampak dalam pengelolaan dana desa yang dirasakan masyarakat desa Sumberrahayu.

2. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terbatas hanya pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga tidak dapat menggambarkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.
3. Dokumen mengenai dana desa tidak dapat diperoleh secara menyeluruh dikarenakan bersifat rahasia sehingga penyajian data mengenai dana desa hanya berdasarkan hasil dari wawancara yang disesuaikan dengan informasi pada Rencana Kerja Pemerintah desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja desa, serta data Indeks Desa Membangun.

### 5.3. Saran

1. Kepala desa perlu melakukan pengenalan dan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan aturan pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa sehingga perangkat desa memiliki pengetahuan serta kompetensi yang memumpuni dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk menjaga stabilitas dana desa yang terbatas, Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan dana desa sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel.
3. Pemerintah kalurahan Sumberrahayu perlu memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sumber daya masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja yang berasal dari BUMDesa. Sehingga desa dapat mengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum, mengoptimalkan aset desa, dan meningkatkan potensi desa sehingga menjadi desa yang mandiri.
4. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, agar mampu mengidentifikasi program-program yang sedang dilaksanakan oleh perangkat desa sehingga dapat memberikan gambaran lebih spesifik mengenai program yang telah berjalan yang dibiayai dana desa.

5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan sampel penelitian yang berasal dari masyarakat desa sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aria, G., (2019), "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua". Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Arikunto., (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astuty dan Eligia., (2013), "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), *E-journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negri Surabaya*.
- Deddy Mulyana., (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dr. Laksmi dkk., (2015), *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ekawati, N., Agustar A., dan Analia, D., (2022), "Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM), *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 13 (2).
- Mardiasmo., (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Rakhmat., (2018), *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rindorindo, N., Tanor, O., dan Pangkey, J., (2021), "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)", *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol 2 (1).
- Sigalingging, A., (2014), "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2 (2).
- Sofyani, H., Riyadh, H., dan Fahlevi, H., (2020), "Improving Service Quality, Accountability And Transparency of Local Governance, *Cogent Business & Management*, Vol 7 (1).
- Sugiyono., (2017), *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W., (2015), *Akuntansi Desa Paduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Pers.
- Tambunan, B., Sihombing, M., dan Harahap, R., (2020), "Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara", *PERSPEKTIF*, 9(2): 438-446.
- Ulum, I., (2015), *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Wibisono, H., (2018), “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa”, *Jurnal Universitas Negri Semarang*, Vol 4 (1).

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No.1, Hal.21-37.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 Huruf G.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 20.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tentang Daftar Alokasi Dana Desa Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

**Referensi Internet:**

<https://idm.kemendesa.go.id/rekomendasi>

<https://sumberrahayusid.slemankab.go.id/first>

